

HAK BURUH DALAM LINGKARAN KOMUNIKASI DAN KONSUMSI KONTEMPORER

Indri Djanarko¹ dan Rommel Utungga Pasopati²

¹Dosen Pancasila di Universitas Narotama Surabaya
(Jl. Pandugo Baru IV/E-12, Rungkut, Surabaya)

²Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta
(Jl. Mampang Prapatan IV/49B, Mampang, Jakarta Selatan)
E-mail: rommelpasopati@yahoo.com

Abstrak

Buruh adalah faktor penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan konsumsi buruh. Buruh bukanlah kelompok nomor dua karena mereka adalah produsen dan konsumen sekaligus. Pada masa Orde Baru, Hubungan Industrial Pancasila (HIP) muncul untuk menjembatani komunikasi buruh, namun masih belum sesuai hingga saat ini. Serikat buruh pun dinyatakan sebagai simbol perwakilan buruh untuk memperjuangkan hak mereka dalam dialog. Kedua hal tersebut diakomodasi supaya terjadi keterbukaan dalam komunikasi hak buruh. Pada sisi lain, komunikasi antara buruh, negara, dan pasar, juga termediasi oleh opini publik yang sayangnya sering kali mencibir efek samping dari protes buruh daripada fokus pada isu perjuangannya. Mulai dari sampah se usai demonstrasi, konsumsi buruh yang berlebihan, hingga kecemburuan kelas menengah, adalah sisi lain hak buruh. Media massa pun seringkali sangat netral terhadap perjuangan buruh namun menjadi sangat negatif mengenai dampak samping hal tersebut. Maka, hak buruh menunjukkan kompleksitas dialog antara komunikasi pemahaman dan konsumsi buruh. Dengan metode penelitian kualitatif, komunikasi, konsumsi, dan opini publik dianalisis dalam kompleksitas hak buruh terkait persoalan keberagaman perspektif. Kesimpulannya, pemahaman tentang hak buruh adalah terbuka karena kompleksitas komunikasi yang selalu dimaknai dan diinterpretasi dalam lingkaran konsumsi.

Kata Kunci: hak buruh, komunikasi, konsumsi, opini publik, serikat buruh

Abstract

Labor is such important factor in growing and making prosper and equal economic consumption. Labor is not just second kind of people because they are both producers and consumers. In Orde Baru, Hubungan Industrial Pancasila (HIP) was meant to bridge labor communication, but it still not effective until today. Labor union also is stated as delegation to struggle for the rights. Both things were accomodated to open labor communication. Besides, communications among labor, state, and labor are mediated through public opinion which says bad things on side effects of labor protests. Trash after protests, excessive labor consumption, until middle-class jealousy are other sides of labor rights. Mass media could be so neutral in labor protests but be so negative on the side effects. Therefore, labor rights shows complex dialogues between communication and consumption. This article uses qualitative method to analyze spectrum of labor right perspectives. In conclusion, hospitality is shown in labor right interpretation because it is how meanings come through circle of consumprtions.

Keywords: communication, consumption, labor rights, labor union, public opinion

Pendahuluan

Hak buruh adalah suatu hal yang melekat dalam konstelasi buruh dari awal hingga saat ini. Konsep tersebut bukan sekedar hal yang tetap melainkan selalu bergerak dalam konsep kebebasan pula (Djanarko, 2014: 5). Perkembangan tersebut tidak hanya secara pasif dalam hal buruh yang selalu diidentikkan dengan perkara produksi namun juga secara aktif sebagai aktor penentu makna mereka sendiri. Bagaimanapun juga, buruh adalah faktor penting baik bagi pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi dalam aspek kesejahteraan sebagai pandangan utama bagi pemenuhan kebutuhan dalam konsumsi buruh. Tidak dapat dikatakan bahwa buruh adalah kelompok maupun individu nomor dua karena mereka adalah motor penggerak produksi dan konsumsi serta bentuk dari kehadiran kebebasan manusia serta warga negara pula sekaligus dalam eksistensinya (Irfansyah dalam Arief dan Utomo, 2015: 64).

Buruh adalah salah satu aspek penting dalam konstelasi negara-pasar-masyarakat. Buruh dapat berada pada satu sisi saja namun juga berada pada sisi lain. Mereka sungguh adalah bagian dari ketiganya namun bukan bagian dari ketiganya sekaligus. Pada satu sisi, pergerakan mereka diatur oleh undang-undang melalui serikat buruh pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 (Djanarko, 2014:3). Serikat buruh adalah wadah pergerakan hak buruh untuk dapat dipenuhi oleh ketiga aspek tersebut. Pada sisi lain, keterkaitan buruh dengan perusahaan mengemuka

dengan penekanan pada proses produksi pada pasar. Pada sisi masyarakat, eksistensi buruh mendapat perhatian daripada sekedar esensinya dalam proses produksi. Apa yang dituntut oleh buruh mempengaruhi opini publik terhadap mereka.

Hak buruh sesungguhnya tidak pernah terdefiniskan namun termaknai secara terbuka dalam komunikasi. Selalu ada ketidaksesuaian kondisi buruh terkait ketiga aspek sebelumnya di atas. Hal inilah yang membuat kondisi buruh selalu terbuka seperti halnya komunikasi yang sekaligus mengandung ketidaktetapan yang mengarah pada fleksibilitas hak buruh. Tidak mungkin ada individu maupun kelompok buruh yang selalu puas terhadap keadaannya karena demikianlah hak asasi buruh itu sendiri bergerak (Djanarko, 2014: 5). Protes buruh menunjukkan pandangan mereka yang jauh dari ketetapan absolut. Meskipun demikian, ketiga aspek tersebut selalu ingin mendefinisikan buruh dalam sebuah ketetapan termasuk dalam pergerakannya. Mulai dari upah yang diatur tiap tahunnya, pengawalan gerakan demonstrasi, hingga keikutsertaan secara politis selalu ditetapkan dalam batasan tertentu menurut aturan yang sah. Dari paradoks di atas, konstelasi buruh berada dalam dualitas yang terkonstruksi dan mengonstruksi. Lingkaran komunikasi buruh bukan tercantum dalam lingkup kecil dan satu arah melainkan termaknai dalam jaringan individu, kelompok, pasar, negara, hingga masyarakat sekaligus.

Sebagai manusia, buruh memiliki kemampuan aktif untuk memaknai dirinya sendiri. Mereka bukan masyarakat kelas bawah yang hanya bisa ditindas oleh kekuasaan yang jauh lebih besar darinya. Jika dilihat lebih jauh, kondisi buruh berada pada pusran kelas menengah kontemporer. Pada aspek ekonomi, buruh hanya dipandang sebagai faktor produksi perusahaan. Buruh perlu diberi upah secukupnya sesuai apa yang dikerjakan oleh mereka. Secara lebih luas, pada aspek kultural, buruh termaknai sebagai bagian dari masyarakat sebagai aktor konsumsi. Konsumsi ini adalah keharusan bagi dirinya sebagai manusia yang hidup. Dari aspek ekonomi dan kultural, makna kondisi buruh di sisi pasar dan masyarakat pun dapat dipertukarkan sehingga keberagaman interpretasi terhadap aktor ini mengemuka. Buruh tidak hanya hidup sebagai aspek produksi dalam pasar namun juga konsumen sekaligus. Mereka tidak hidup pada satu sisi saja namun juga menghidupi yang lain. Demikian pula dengan kondisi masyarakat yang menyiratkan buruh sebagai konsumen dan produsen makna dirinya sendiri. Definisi yang mereka telan tidak lalu ditularkan namun menjadi inspirasi untuk selalu menginterpretasi keadaan dan situasi.

Baik komunikasi dan konsumsi adalah saling berkaitan terutama dalam memandang kondisi buruh di masa ini. Selalu ada irisan yang mampu membebaskan buruh dari sekedar definisi meskipun mereka seringkali tidak menyadari hal tersebut. Inilah

yang membentuk interaksi antara komunikasi dan konsumsi. Bukan berarti lalu yang definitif ditinggalkan, melainkan masih ada alternatif pandangan untuk melihat kondisi buruh secara terbuka dalam kedudukannya sebagai sesama manusia.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dari artikel ini ditelusuri melalui beberapa teori, konsep, maupun wacana hak buruh, kebebasan dan eksistensi, komunikasi dalam dialog dan interaksi, konsumsi ekonomis hingga budaya, serta opini publik, dan ruang publik demokratis. Tentang hak buruh, hal ini merujuk pada pelepasan diri dari kepastian konsep tentang buruh itu sendiri. Buruh selalu terkait dengan konsep hak dan kewajibannya sebagai alat produksi. Hak buruh adalah berbeda karena lebih kompleks dari sekedar alat produksi atau upah sebagai hasil kerja buruh. Hak buruh menunjukkan kompleksitas hubungan antara buruh sebagai individu, alat produksi, dan warga negara sekaligus melampaui uang. Jauh daripada sekedar kesejahteraan material, hak buruh menunjukkan pengandaian tentang kebebasan dan eksistensi manusia itu sendiri, hanya jika demikian maka pemahaman tentang buruh dapat diperluas.

Dalam hal kebebasan dan eksistensi manusia, keduanya adalah premis penting bagi alasan masyarakat untuk menghidupi dirinya. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa ada pemahaman tentang kodrat dan

harapan (Adorno dalam Djanarko, 2014: 10). Keduanya terkait kondisi manusia yang tidak sekedar terkonstruksi namun juga mengonstruksi dirinya sendiri dalam konteks kebebasan manusia. Bahwa seseorang dapat memenuhi eksistensi dirinya tanpa hak kodratnya dipenuhi adalah tidak mungkin. Kebebasan adalah hak untuk memilih, terutama suatu keadaan yang sadar akan adanya penindasan dan ketergantungan. Individu mungkin saja tidak bisa lepas dari kedua hal tersebut namun menjadi otonom dalam pilihan sangat diperlukan untuk memberi ruang gerak baginya (Djanarko, 2014: 11). Dengan demikian, kebebasan dan eksistensi manusia bukan sebuah kepastian melainkan keterbukaan makna realitas yang majemuk. Realitas ini sangat beragam sehingga menjadi aktif adalah sebuah kebutuhan bagi eksistensi itu sendiri baik secara kodrati maupun historis pula.

Realitas yang beragam di atas adalah bentuk plural dari diri manusia itu sendiri. Buruh bukanlah manusia yang sudah didefinisikan demikian atau bukan demikian melainkan dapat berubah dalam interaksinya. Interaksi inilah yang mampu membawa buruh melampaui keadaannya yaitu dalam kondisi yang bukan saling mendominasi melainkan saling memampukan (Calhoun, 1992: 54). Konteks ini menjadikan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi melainkan juga dihidupi sekaligus secara bersamaan. Tidak bisa dikatakan bahwa interaksi adalah sebuah kesetaraan karena aksi dan reaksinya sesungguhnya saling

melengkapi. Baik aksi dan reaksi adalah tindakan terbuka yang saling memaknai (Benn, 1988: 124). Ia bukan kondisi satu arah seperti pada upah buruh yang ditetapkan secara sepihak melainkan seperti serikat buruh yang berbincang-bincang secara intensif. Interaksi adalah dialog yang mengandaikan keterbukaan baik sebelum, proses, dan hasil sekaligus.

Dalam hubungan antara negara-pasar-masyarakat, kondisi buruh selalu dinaytakan dan dilanggengkan terkait dengan label pasif dirinya sebagai faktor produksi saja. Di sisi lain, mungkinkah bila buruh dipahami dari sisi lain di luar produksi yaitu pada hilir konsumsi? Jawabannya adalah mungkin karena buruh adalah suatu label yang sesungguhnya terbuka dalam maknanya. Sebagai konsumen, buruh memiliki andil dalam memilih terkait strategi maupun taktik dalam kebebasan dirinya sebagai konsumsi itu sendiri (Highmore, 2002: 154). Ia adalah aktor pula dalam segitiga di atas sebelumnya. Benar bahwa buruh terikat dengan sistem namun keterikatan itu tidak lalu menjadikan buruh lumpuh. Hubungan antara produksi dan konsumsi sesungguhnya resiprokal dan tidak saling menegasi hanya saja konsep modern terlalu mendasarkan diri pada produksi semata dengan memandang rendah konsumsi (Highmore, 2002: 155). Melampaui konsumsi ekonomis, pada sisi kultural dan politis pun buruh bergerak dalam eksistensinya. Buruh adalah entitas dalam interseksi segitiga di atas yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem.

Baik hak dalam eksistensi buruh hingga komunikasi dan konsumsi, semua hal tersebut tercakup dalam ruang publik yang demokratis (Goode, 2005: 44). Ruang publik pun selalu dimaknai oleh buruh. Hal ini terkait dengan konsep kepublikan itu sendiri. Kepublikan mengandaikan adanya dunia yang plural, sosial, dan heterogen terutama karena setiap entitas di dalamnya adalah aktor yang aktif. Dalam ruang publik, buruh bergerak dalam dualitas sebagai subjek dan objek sekaligus. Sebagai subjek, ia adalah pembentuk makna sehingga mereka pun adalah pembentuk dunia itu sendiri. Dengan protes buruh, misalnya, ia dapat membentuk ruang publik sebagai wadah perjuangan bagi kesejahteraan. Suara yang didengar dalam ruang publik adalah bahasa eksistensi itu sendiri. Sebagai objek, buruh adalah sisi pasif dari dunia yang terkonstruksi oleh dominasi. Buruh harus menghadapi tindakan dari pihak lain yang menganggap ruang publik adalah ruang yang bebas bahkan sebagai objek pinggiran bagi aktor ruang publik yang lain.

Satu aspek yang penting dalam ruang publik adalah opini publik itu sendiri. Interaksi antara buruh dan media dapat saling mendukung maupun meniadakan. Seringkali opini publik dimaksudkan dalam netralitas yaitu memberitakan sesuatu hal saja namun seringkali pemihakan juga terjadi (Homes, 2005: 85). Sisi inilah yang selalu menjadi perdebatan dalam kondisi buruh; hak buruh pada satu sisi diperjuangkan namun sisi lain pula

direndahkan demi kepentingan pihak lain. Opini publik tidak bisa lepas dari kepentingan entah itu kekuasaan atau sekedar ekonomi belaka. Tentu kapital menjadi poros utama penentang hak buruh, namun sesungguhnya hak buruh itu melampaui kesejahteraan material. Demikian kiranya kurang lebih bagaimana kelas menengah menilai. Pada sisi lain, buruh sebagai individu manusia juga perlu diperhatikan sebagai aktor yang dapat memilih kehidupannya sendiri. Ketika buruh dipandang sebagai masyarakat kelas dua, sesungguhnya bukan menjadi kelas pertama yang diinginkan, melainkan pemenuhan diri sebagai manusia itulah yang lebih utama.

Metode

Metode penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pandangan yang cenderung eksploratif. Data-data dalam artikel ini adalah berbagai macam teks maupun diskursus dari sumber-sumber kualitatif pula. Artikel ini akan membahas berbagai macam buku, undang-undang, maupun wacana konteks perburuhan saat ini. Selain itu, analisis teks pun akan dilakukan dengan pandangan yang lebih fenomenologis, terutama melalui sisi kondisional dan eksistensial. Pada sisi kondisi, apa yang terkonstruksi akan lebih ditonjolkan sedangkan aspek eksistensi lebih menekankan pandangan tentang kebebasan buruh sebagai manusia.

Hasil dan Pembahasan

Buruh dalam Lingkaran Komunikasi

Komunikasi sesungguhnya mengandaikan dua hal utama yaitu apa yang sudah dipahami sebelumnya dan apa yang hendak dipahami (Goode, 2005: 45). Pada sisi yang telah terpahami, komunikasi mengandaikan konstruksi sosial dalam interaksinya. Konstruksi ini tidak bisa dilepaskan dari tiap aksi dan reaksi dalam interaksi. Buruh dalam lingkaran komunikasi memiliki pengalaman tentang kehidupannya yang kompleks. Mulai dari eksistensi individu hingga serikat buruh, buruh sekaligus memandang dan dipandang sebagai entitas yang sesungguhnya sangat terbuka. Label buruh sebagai faktor produksi jelas akan mendorongnya untuk mendapatkan upah yang layak dari hasil kerjanya. Demikian pula perannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat mendorong buruh untuk meluaskan pandangannya bukan hanya dari sisi penghasilan melainkan juga dari kesejahteraan kultural pula dalam hal pendidikan maupun kesehatan misalnya.

Demikian pula buruh juga memiliki pemahaman tentang komunikasi yang hendak dipahami selanjutnya. Sisi ini menunjukkan pemahaman buruh yang terus berkembang dikarenakan kondisinya yang cair. Jika buruh hanya berjuang berdasarkan apa yang mereka pahami sebelumnya maka mereka pun akan mudah terjebak pada definisi yang ditetapkan oleh perusahaan maupun negara. Pada kenyataannya, buruh selalu melakukan negosiasi sebagai

reaksi dari apa yang terjadi di luar dirinya sendiri. Perkembangan masyarakat pun jelas mempengaruhi konstelasi komunikasi buruh karena buruh adalah sekaligus bagian dan aktor dalam aspek masyarakat itu sendiri. Kondisi buruh dalam lingkaran modernitas juga mendorong mereka untuk selalu menyesuaikan diri supaya tidak lagi dipandang sebagai masyarakat kelas dua.

Baik dalam apa yang telah dipahami dan yang akan dipahami, komunikasi buruh berada dalam jaringan yang saling terkait seperti layaknya lingkaran. Bukan dalam bentuk geometris, lingkaran dimaksudkan dalam kondisi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam interseksi tanpa batas dengan berbagai aspek lain. Demikianlah interaksi hak buruh yang terbuka; ia bukan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya secara penuh melainkan juga berkesempatan untuk selalu dimaknai. Sejauh apapun hak buruh didefinisikan, buruh selalu bergerak melampauinya karena demikian pula makna. Jauh daripada sekedar ekonomis, hak buruh adalah kultural sebagai yang dihayati dan diharapkan sekaligus.

Pada sisi kultural itu sendiri, komunikasi buruh menunjukkan dualitas antara yang ideal dan yang senyatanya. Dualitas ini memang selalu akan bertentangan namun kedua hal tersebutlah yang memungkinkan buruh untuk menjadi cair. Pada satu sisi, buruh tidak dapat dilepaskan dari kondisi kontemporer sedangkan pada sisi lain ia terus berusaha keluar darinya. Yang

ideal dalam komunikasi adalah kesetaraan dengan bahasa sebagai mediumnya. Adanya kesetaraan ini adalah pengandaian dari apa yang dikonsepsikan lalu diterapkan secara langsung ke realitas. Dengan kesetaraan, komunikasi dipandang dalam hubungan yang saling melengkapi dan mendukung. Dengan adanya ketersalingan ini, kepentingan dalam diri diterapkan kepada yang lain dalam batasan tertentu sejauh dipahami oleh yang lain. Sisi ini juga menunjukkan kondisi yang melampaui dominasi subjek terhadap objek lalu bergeser mengarah pada proses menjadikan yang lain sebagai subjek pula. Pemahaman pada yang lain diarahkan pula pada pemahaman ke diri sendiri sehingga yang ideal ini adalah yang baik bagi kedua pihak dalam komunikasi.

Pada kenyataannya, yang ideal itu tidak pernah sesungguhnya terjadi sepenuhnya. Perubahan akan selalu terjadi dalam komunikasi buruh baik sebagai subjek maupun didominasi sebagai objek. Pemahaman pun terjadi hanya berbasis kepentingan sejauh diterapkan kepada yang lain (Hidayat, 2015). Kepentingan ini benar-benar tidak memahami yang lain sehingga proses mendengarkan tidak pernah terjadi dari aspek eksternal. Proses mendengarkan dalam interaksi sosial menjadi tertutup hanya pada sekedar aspirasi semata. Komunikasi yang terjadi hanyalah sekedar gabungan aksi dan reaksi tanpa interaksi yang sungguh ideal. Hanya aksi dan reaksi saja jelas menunjukkan hubungan satu arah yang tidak saling memungkinkan namun saling

menundukkan demi kepentingan masing-masing saja.

Pada masa Orde Baru, pandangan tentang Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dianggap sebagai yang ideal dalam fokus buruh pada negara, masyarakat, dan perusahaan. Pada sisi ini, buruh dimampukan supaya selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik dalam kemanusiaan maupun kebersamaan. Perjuangan buruh pun diakomodasi dengan baik sehingga bisa mendorong keaktifan buruh untuk selalu memaknai dinamika di sekitarnya. HIP dimaksudkan untuk menjembatani berbagai perbedaan dari berbagai pihak pula yang berselisih untuk mencari kesamaan dan titik temu dengan cara musyawarah untuk mufakat (Djanarko, 2014: 89-90). Konsep ini muncul untuk memfasilitasi buruh dalam komunikasinya supaya selalu tetap dalam koridor Pancasila yang dialogis tanpa aksi sepihak yang merugikan. Konsep yang baik terkait Pancasila di atas nyatanya juga tidak mampu membawa komunikasi buruh dalam kondisi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan aspek di luar buruh tidak dapat melepaskan diri dari apa yang telah mereka pahami sebelumnya. Bahasa buruh dalam konsep perburuhan tersebut masih definitif sebagai alat produksi sehingga komunikasinya tertutup hanya pada upah dengan negara dan perusahaan. Bahasa tersebut dianggap hidup padahal sesungguhnya begitu tetap dan tertutup. Oleh karena itu pula, perusahaan pun hanya memandang buruh dari pertukaran jasa terhadap

upah saja. Pemahaman dalam konsep Pancasila tersebut tidak dapat membawa kepada lingkaran yang lebih besar namun hanya terpaku pada aspek yang sudah jelas saja sebelumnya.

Demikian pula halnya saat Orde Baru berakhir, kondisi buruh ternyata berada jauh di luar konsep tersebut. Konsep HIP di atas hanya bertumpu pada proses produksi sedangkan buruh sekaligus juga berada pada proses konsumsi di luar perannya sebagai buruh. Dengan kata lain, konsep tersebut masih terbatas sebagai restriksi dari luar terhadap hak buruh itu sendiri. Konsumsi ini perlu dipandang sebagai perluasan konsep buruh yang bukan hanya sebagai pekerja melainkan juga individu dan kelompok dalam keluarga serta masyarakat. Demikian pula dengan pandangan Pancasila di atas yang sangat membutuhkan pandangan dan campur tangan dari negara. Pada masa saat ini, negara mulai berkurang keikutsertaannya terhadap produksi dan konsumsi dan lebih menyerahkannya pada fluktuasi pasar. Dengan adanya konsep pasar ini, buruh diuntungkan dengan dapat memperluas konsepnya dalam konsumsi namun juga makin terkait dengan produksi karena pasar adalah perusahaan itu sendiri pula. Hal yang sama juga terjadi pada konsep perjuangan buruh itu sendiri. Bila dalam masa HIP, buruh dimampukan berada di dalam sistem untuk melakukan dialog sedangkan pada masa ini lebih berada di luarnya. Seringkali demonstrasi yang dilakukan belakangan ini hanya berkuat pada aspek masyarakat saja tanpa bisa menusuk ke sistem pasar itu sendiri

(Irfansyah, 2015). Kondisi Indonesia yang terpengaruh oleh kondisi pasar memaksa buruh untuk hanya bergerak di luar sistem dan seringkali kembali hanya berkuat pada upah semata.

Komunikasi buruh selanjutnya juga dipengaruhi oleh keberadaan serikat buruh. Serikat buruh dimampukan sebagai badan hukum guna menyelesaikan perselisihan industrial, wakil buruh dalam berbagai bentuk kerjasama, penyalur aspirasi, hingga pembentuk pemogokan buruh yang telah diatur undang-undang (Djanarko, 2014:31-32). Menariknya, serikat buruh makin berkembang dewasa ini berdasarkan kekhususan produksinya sendiri-sendiri. Kekhususan tersebut menunjukkan pandangan sebagai sebuah *commune* yang interaktif dalam dialog. Makin berkembangnya serikat buruh tentu juga makin melantangkan suara mereka dalam komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Konsep serikat buruh ini bila dipandang dari aspek kultural maka sangat dialogis di dalam namun terabaikan di luar. Di dalam serikat buruh itu sendiri, banyak rapat dilakukan sebagai bentuk respon terhadap sebuah kondisi dan situasi. Tentu hal ini membawa makna dan kesetaraan lebih lanjut dalam proses menjadikan tiap anggotanya sebagai subjek yang dihargai. Seringkali pula perusahaan ikut campur dalam serikat buruh padahal tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut (Djanarko, 2014: 60). Kekuatan serikat buruh tidak semudah itu dirusak oleh kepentingan pasar. Pada sisi lain, serikat

buruh meskipun mampu mengorganisasi individu buruh dan berbagai kelompoknya, nyatanya sangat susah untuk mengubah sebuah kebijakan tertentu. Masih sangat sulit untuk melepaskan label buruh sebagai mayarakat kelas dua. Selain itu, hak buruh dalam aspek ini termaknai dalam limitasi hak itu sendiri, yaitu sejauh ia bergerak bebas di dalam maka belum tentu ia dapat keluar dengan bebas pula. Dengan kata lain, serikat buruh memungkinkan komunikasi untuk makin meluas namun seringkali juga tidak membawa dampak apapun selain interaksi yang makin intens itu sendiri.

Buruh dalam Lingkaran Konsumsi

Dalam aspek ekonomi, produksi dan konsumsi adalah dua istilah yang paling sering digunakan dalam membentuk hasil dan menghabiskan hasil tersebut. Dalam sebuah garis yang linier, produksi selalu dilanjutkan dengan konsumsi. Produksi selalu berada di hulu sedangkan konsumsi adalah bagian hilir. Keduanya tidak saling terpisah namun menunjukkan sebuah hirarkhi yaitu produksi berada sebelum konsumsi itu sendiri. Logika ini adalah logika kondisi modern saat ini. Sebuah keniscayaan telah dinyatakan bahwa produksi terpisah dari konsumsi karena keduanya terletak dalam sistem yang berbeda. Kenyataannya, dalam aspek kultural keduanya saling berbaur dalam kehidupan manusia tanpa mudah dipisahkan. Bila ada pemisahan, itu digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. Seringkali yang terjadi adalah ilmu pengetahuan itu

menjadi standar baku bagi kehidupan manusia padahal senyatanya tidak demikian.

Dalam hak buruh, label buruh sebagai faktor produksi sangat terlihat dalam kehidupan modern kontemporer. Mereka adalah bagian dari sistem produksi namun seringkali pula teralienasi dari sistem konsumsi proses hiper-modernisasi (Highmore, 2002: 131). Pada aspek ini, buruh tidak bisa keluar dari sistem produksi dan hanya akan mengonsumsi sejauh diberikan oleh sistem saja. Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan sebuah dominasi produksi atas konsumsi itu sendiri dengan buruh sebagai objek daripada subjek. Selanjutnya, mari kita geser analisis buruh ke arah konsumsi. Bila dilihat dari sisi konsumsi, keberadaan buruh sesungguhnya sangat terbuka dibandingkan hanya terikat pada sistem produksi saja. Buruh dalam lingkaran konsumsi mampu memilih bagi dirinya sendiri di luar pekerjaan utamanya sebagai faktor produksi. Seringkali pula pekerjaannya itu malah dapat memperkaya makna tentang produksi tersebut dalam kehidupannya. Dalam hal ini pula hak buruh mendapat makna lebih luas, bukan hanya dalam upah kerja namun terbentuk dari perannya sebagai individu dan bagian dari masyarakat.

Dari aspek konsumsi, hak buruh adalah fleksibel namun tidak semata-mata lepas dari produksi itu sendiri. Dalam sebuah demonstrasi buruh, apa yang dituntut oleh para buruh bukan hanya sekedar memang apa yang menjadi kebutuhan melainkan juga

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, buruh pun adalah aktor bagi sistem dalam pasar-masyarakat-negara. Mereka bukan masyarakat kelas dua yang hanya bisa diam di bawah dominasi kekuasaan yang lebih besar. Berbagai pilihan yang mereka ambil adalah bentuk kebebasan mereka dalam membentuk sekaligus dibentuk dalam makna konsumsi yang terbuka (Buchanan, 2000: 93). Hal ini dilatarbelakangi oleh kemunculan kelas menengah dewasa ini. Geliat kelas menengah telah membawa hak buruh untuk dimaknai bukan dalam dualitas borjuis dan proletar namun juga keduanya yang dapat memilih. Kemakmuran dan kesejahteraan bukan lagi hanya milik para penguasa uang melainkan juga hak buruh untuk mencapainya. Mereka ada untuk berjuang demi kesejahteraan baik ekonomi dalam hal upah maupun kultural dalam hal kesehatan atau pendidikan demi hidup yang lebih baik. Jika pemilik perusahaan bisa memiliki hal-hal yang mewah maka demikian pula buruh. Baik pemilik perusahaan dan buruh adalah dua aspek yang berbeda namun sesungguhnya tidak sekaligus bertentangan.

Seringkali buruh dipandang hanya sebagai pelengkap dalam aspek produksi terutama pada masa sekarang saat mesin sudah mengambil alih pekerjaan mereka. Hal itu hanya dilihat dari sisi produksi saja. Di sisi lain, proses produksi dan konsumsi sebenarnya adalah dua proses yang tak mudah dilepaskan dalam definisi tertentu

(Buchanan, 2000: 96). Adanya konsumsi adalah karena produksi, demikian pula sebaliknya. Interpretasi atas hak buruh pun makin beragam mulai dari kehidupan sehari-hari hingga perannya sebagai warga negara. Hak buruh memiliki spektrum dalam dirinya sendiri yang beragam melampaui homogenitas dalam kehidupan modern. Dalam modernitas, buruh sebagai faktor produksi dianggap sebagai definisi yang tetap untuk selamanya. Pada kenyataannya, buruh adalah sekaligus esensi yang tetap namun juga cair pula dalam eksistensinya. Memandang konsumsi selain hanya sekedar aspek produksi memungkinkan analisis untuk melihat sisi lain yang selama ini didominasi oleh modernitas. Buruh adalah heterogen dalam berbagai interaksi yang meliputinya. Mereka bukan hanya hidup dalam label dan stigma sebagai masyarakat kelas dua melainkan juga memiliki pilihan-pilihan dalam keputusan konsumsi mereka.

Kompleksitas Hak Buruh dalam Opini Publik

Hak buruh adalah sebuah kondisi bagi para buruh di dalam ruang publik. Ruang publik di Indonesia adalah demokratis dengan berbagai kesempatan terbuka bagi makna individu maupun kelompok. Pada aspek ini, hak buruh dimaknai tidak dalam definisi tertutup melainkan terbuka sesuai dengan keadaan masyarakat pula. Baik komunikasi maupun konsumsi kontemporer bersinggungan pula dengan hak buruh dalam ruang publik. Ruang publik ini pun juga dinamis yang

ditunjukkan bukan dengan adanya definisi tentang publik melainkan diskursus tentang opini publik.

Opini publik dapat dimunculkan oleh media massa, pernyataan pemerintah, tindakan serikat buruh, gejala pasar, hingga media sosial maya dewasa ini. Di antara berbagai aspek tersebut, hal yang paling cair adalah media massa dan media sosial maya. Keduanya mampu membentuk wacana publik tentang sesuatu hal termasuk hak buruh. Hal yang paling banyak disoroti adalah tentang tindakan buruh dan serikatnya di ruang publik itu sendiri. Tindakan tersebut bisa berupa demonstrasi, mogok makan, hingga bentrok dengan aparat sekalipun (Dirhantoro, 2015). Semua hal tersebut adalah informasi, namun baik media massa maupun media sosial virtual mbingkainya dalam wacana tertentu. Wacana tersebut tidak lagi dapat dikatakan netral dan hanya sekedar berita semata namun merupakan bentukan dominasi yang malah mengerdilkan buruh itu sendiri. Berita yang informatif tersebut sudah selalu mengandung pengandaian tentang suatu hal terkait hak buruh dalam aspek baik maupun buruk seklaipun. Dalam hal ini, memang benar bahwa ruang publik itu netral bahkan dapat dikatakan nihil. Manusia yang memaknai, beberapa pihak mengakuisisi dan mendominasi, sedangkan beberapa lainnya mencari celah untuk membentuk wacana alternatif.

Opini publik yang dipengaruhi oleh media massa maupun media sosial virtual seringkali mencibir efek samping

dari protes yang dilakukan oleh buruh daripada fokus pada apa yang diperjuangkan oleh mereka (Pribadi, 2015). Efek samping ini dipahami dalam kerangka ruang dan waktu dari tindakan buruh itu dan bukan pada perjuangan buruh itu sendiri. Mulai dari sampah yang ditinggalkan sesuai demonstrasi, kemacetan yang muncul saat protes berlangsung, konsumsi sehari-hari buruh yang dianggap berlebihan, hak asasi manusia yang dilanggar karena pemaksaan keikutsertaan dalam demonstrasi, hingga kecemburuan daripada pekerja kelas menengah, adalah beberapa bentuk sisi lain pesan dari hak buruh (Irfansyah dalam Arief dan Utomo, 2015: 64). Sisi lain inilah yang membentuk opini publik itu sendiri. Opini publik sangat jarang masuk ke dalam inti sistem melainkan bermain di wilayah pinggiran yang sangat luas dan penuh makna bahkan aspek kelas menengah pun sekaligus dapat memfasilitas dan mencibir buruh sekaligus.

Media massa pun seringkali menjadi sangat netral terhadap perjuangan buruh namun menjadi sangat negatif mengenai dampak samping kegiatan tersebut. Perjuangan buruh selalu dianggap sebagai hal yang wajar terutama saat 1 Mei tanpa melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh buruh. Netralitas terhadap inti berita itu memang informatif, tapi tidak pula berpihak pada yang lemah akibat dominasi kekuasaan yang lebih besar (Hidayat, 2015). Hal yang sering terjadi kemudian adalah pengikisan nilai protes yang dilakukan buruh melalui efek

samping dari tindakan yang mereka lakukan. Demikian pula dengan media sosial virtual yang meskipun makin terbuka dengan berbagai ideologi namun nyatanya juga seringkali mencibir mereka yang dianggap kelas dua (Irfansyah dalam Arief dan Utomo, 2015: 64). Sebuah hal yang dinamakan ketidakingintahuan secara lebih lanjut sering kali dilakukan dengan hanya mengonsumsi suatu berita saja tanpa menelusurinya lebih lanjut.

Pada sisi komunikasi, opini publik dan hak buruh berelasi dalam pandangan yang stigmatis tentang buruh. Di masa ini, ketika protes buruh dilakukan, yang berarti mengikutsertakan banyak orang, individualitas merasa terganggu karena diusik oleh adanya isu buruh. Keberadaan banyak orang yang mendukung sebuah isu tertentu terlalu dianggap terpisah dari kehidupan orang banyak padahal nyatanya interaksi itu selalu terjadi. Ketika para buruh menyuarakan pendapatnya, stigma itu muncul kembali tentang mereka sebagai warga kelas dua. Banyak orang menganggap bahwa buruh memang layak diberi upah tinggi namun jangan terlalu tinggi supaya tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Stigma ini rupanya digunakan untuk membatasi buruh dalam ruang publik, bukan karena ruang publik itu adalah milik umum, melainkan karena terganggunya sistem modernitas yang sudah mapan. Jika demikian yang terjadi, maka komunikasi yang ideal yaitu yang interaktif tidak dapat terjadi. Tidak dapat dikatakan bahwa urusan hak buruh hanya

berkaitan dengan negara dan perusahaan karena masyarakat pun adalah salah satu sisi lain dari buruh.

Pada sisi konsumsi, makin diperhatikannya buruh sebagai konsumen menunjukkan adanya perhatian terhadap buruh sebagai manusia di luar hanya sekedar alat produksi saja. Buruh pun memiliki kebutuhan layaknya seorang pemilik perusahaan, namun sekan-akan ada ketakutan pada buruh ketika mereka mengaktualisasi kebebasan berpendapatnya. Secara kultural, tidak dapat dikatakan secara langsung bahwa buruh ingin merusak sistem kapitalis pasar karena yang mereka inginkan sebenarnya adalah kebenaran dan kesetaraan. Yang benar dan yang setara melampaui yang lapar. Kondisi buruh adalah bukan terdefinisi dalam ketetapan, melainkan bentuk cairnya memungkinkan mereka untuk bukan hanya 'teriak lapar' lalu 'diam kenyang' melainkan juga 'teriak kenyang' atau pula 'lapar diam'. Kompleksitas inilah bentuk hak buruh saat ini.

Simpulan

Hak buruh terbentuk dalam kondisi komunikasi dan konsumsi kontemporer dalam lingkaran interaksi yang saling memaknai. Wacana hak buruh terus berkembang berdasarkan kebebasannya baik pada masa Hubungan Industrial Pancasila hingga suburnya Serikat Buruh masa sekarang ini. Sejauh komunikasi dimaknai, buruh bergerak dalam dialog internal dan eksternal dari kondisi luar. Demikian pula konsumsi memungkinkan buruh

keluar dari konteks alat produksi semata. Keduanya berada dalam ruang publik yang pada satu sisi menyediakan kesempatan namun di sisi lain terus merendahkan buruh. Hanya ketika kepublikan itu terus dipertanyakan keterkaitannya dengan hak buruh maka ruang publik makin bermakna pula bagi buruh itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Benn, Stanley I., 1988, *A Theory of Freedom*, Cambridge University Press: Cambridge.
- Buchanan, Ian, 2000, *Michel de Certeau: Cultural Theorist*, Sage: London.
- Calhoun, Craig, (ed.), 1992, *Habermas and The Public Sphere*, MIT Press: Cambridge.
- Dirhantoro, Tito, 2015, *Tolak PP Pengupahan, Buruh Akan Mogok Nasional*, (online) dalam <http://geotimes.co.id/tolak-pp-pengupahan-buruh-akan-mogok-nasional/>, diakses 14 Februari 2016.
- Djanarko, Indri, 2014, *Tesis: Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh*, Universitas Narotama: Surabaya. Tesis tidak diterbitkan.
- Goode, Luke, 2005, *Jürgen Habermas: Democracy and the Public Sphere*, Plato Press: London.
- Hidayat, Reja, 2015, *Serikat Buruh Dunia: Pidato Jokowi Sangat Kontradiktif Soal Buruh*, (online) dalam <http://geotimes.co.id/serikat-buruh-dunia-pidato-jokowi-sangat-kontradiktif-soal-buruh/>, diakses 14 Februari 2016.
- Highmore, Ben, 2002, *Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction*, Routledge: London.
- Homes, David, 2005, *Communication Theory: Media, Technology, Society*, Sage: London.
- Irfansyah, Azhar, 2015, *Ada Apa dengan Polisi dan Buruh Kita*, (online) dalam <http://geotimes.co.id/ada-apa-dengan-polisi-dan-buruh-kita/>, diakses 14 Februari 2016.
- , 2015, "Rutinitas Berita dan Sinisme Terhadap Buruh", dalam Arief, Yovantra dan Utomo, Wisnu Prasetya, 2015, *Orde Media: Kajian televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru*, INSISTPress: Yogyakarta.
- Pribadi, Airlangga, 2015, *Mengapa Kelas Menengah Membenci Buruh?*, (online) dalam <http://geotimes.co.id/mengapa-kelas-menengah-membenci-buruh/>, diakses 14 Februari 2016.

